

DAMPAK REKLAMASI DI KAWASAN PESISIR PULAU BATAM TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP NELAYAN SEKITAR

Eric Elmahyudi Putra¹, Dedi Epriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
email :pb161010032 @upbatam.ac.id

ABSTRACT

BWS Sumatera IV Batam City in carryin out reclamation activities on the island of Putri Nongsa,Batam city evaluates the policies issued.The activities carried out on Putri Island actually have an impact on the economic development of the people arround Putri Island,especially fishermen.Therefore,it is necessary to evaluate policies so that the regulations implemented in the field run according to what was planned at the beginning.According to law No 1 of 2014 concerning the management of coastal areas and small islands,reclamation of coastal areas and small islands is carried out in order to increase the benefits and or added value of coastal areas and small islands in terms of technical,environmental and socio-economic aspects.The purpose of this study is to evaluate the impact felt by fishermen and also the surrounding community as one of the consequences arising from coastal reclamation activities in the island area of the city of Batam.Data Collection techniques are interviews,observation,and documentation.The research objects are employees of BWS Sumatera IV Batam City,fishermen,and the surrounding community.The research result is to evaluate reclamation activities that have an impact on the surrounding community carried out by BWS Sumatera IV Batam City which as a whole has not reached the standard because there are still gaps between related parties and society.Based on policy evaluation indicators,namely effectiveness,efficiency,sufficiency,equality,responsiveness,and efficiency,policy evaluation is still not effective and efficient enough so that this reclamation activity is still experiencing obstacles and obstacles in its implementation in the field which has not been able to have a significant impact on the economic sustainability of the community the surroundings.

Keywords: Impact, Policy Implementation, Reclamation

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara maritime yang memiliki garis pantai terpanjang ke 4 di dunia setelah Amerika Serikat,Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai $\frac{3}{4}$ dari wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087 km²). Saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dengan perkembangan dan peradaban dari kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir tersebut untuk mencapai segala macam kepentingannya.Konsekuensinya

adalah ketika ketersediaan lahan untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Agar memperoleh lahan,maka kota-kota besar ini melihat daerah yang selama ini terlupakan,yakni pantai yang umumnya mempunyai kualitas lingkungan hidup yang rendah. Fenomena ini bukanlah pertama yang dialami di Indonesia saja, tetapi juga dialami oleh negara-negara maju sehingga daerah di pantai menjadi perhatian dan harapan dalam penyelesaian ketersediaan hunian tempat tinggal penduduk. Penyediaan lahan diwilayah sekitar pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada seperti perairan pantai,lahan basah,pantai berlumpur

dan lainnya sebagai sesuatu yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan sehingga dapat dibentuk lahan lain yang dapat memberikan dampak dan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Berdasarkan Undang Undang No.32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Kota Batam adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dengan letak geografis nya yang sangat strategis yang dapat meningkatkannya sebagai perekonomian kota yang menjadikannya sebagai pusat industri serta jalur destinasi bisnis dan perdagangan. Guna mendukung semua itu, Batam dapat memperluas wilayahnya, yakni melalui digabunginya beberapa pulau sekitar seperti Pulau Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru dengan jembatan megahnya, bahkan Batam sendiri membagi kawasannya menjadi beberapa bagian yaitu; kawasan Industri, kawasan wisata, kawasan penyedia air bersih, dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi lingkungan Batam saat ini semakin banyaknya terjadi kerusakan lingkungan akibat dari perluasan wilayah dan lahan guna memajukan sektor perkenomian di kota Batam. Hal ini akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor,

banjir, oksigen yang semakin berkurang dan rusaknya ekosistem laut dan ini pula sungguh sangat memprihatinkan. Dikarenakan adanya pembangunan besar-besaran ini seperti pembangunan perumahan, pembangunan jalan dan pembangunan industri tentu saja akan berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Misalnya saja dengan rusaknya ekosistem laut yang akan mempengaruhi kehidupan nelayan. Penyebab kerusakan lingkungan terparah di Batam adalah pembalakan hutan untuk dijadikan kawasan industri dan perumahan, penjualan tanah laut, serta penimbunan tanah laut. Hingga detik ini pun yang paling terasa adalah penimbunan laut atau yang sering didengar dengan istilah reklamasi dan penjualan tanah laut. Penjualan tanah laut ini akan menyebabkan pesisir pantai mengalami abrasi. Sedangkan reklamasi itu akan menyebabkan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi menjadi rusak. Selain itu, ekosistem laut yang berada di kawasan reklamasi dan sedot pasir laut juga ikut rusak pula.

Reklamasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pembangunan. Reklamasi dapat diartikan sebagai upaya pengadaaan lahan dengan cara mengeringkan rawa, daerah pasang surut dan sebagainya. Reklamasi menjadi alasan utama dalam pemekaran kota sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dari pertambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001:19) Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai. Ruang lingkup Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil,

reklamasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/ atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Kegiatan reklamasi pantai tidaklah dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan isi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan perkotaan yang berada di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat yang berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai yang dilakukan menimbulkan berbagai masalah yang membawa dampak negatif dan dampak positif di lingkungan perkotaan.

Dampak reklamasi pantai adalah hal yang patut dikaji dan diperhatikan dalam lingkungan perkotaan yang berkelanjutan sehingga kedepannya manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama Lingkungan perkotaan yang berkelanjutan mempengaruhi pola perilaku manusia yang ada didalamnya. Hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan perkotaan merupakan proses dua arah yang konstruktif, didukung baik oleh ciri citra (image) lingkungan maupun ciri sifat kegiatan dan kejiwaan manusia.

Kota – kota besar di Indonesia merupakan kota – kota yang berada di tepi pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung laju pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berlangsung di suatu kota.

Batam adalah salah satu kota yang melakukan reklamasi pantai. Adanya pembangunan reklamasi di Kota Batam, yang dikembangkan menjadi kawasan industrialisasi dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya Central Business District (CBD), mengakibatkan adanya wajah kota pada daerah pesisir pantai yang secara tidak langsung mempengaruhi lingkungan perkotaan yang ada. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Batam menjadi lebih condong ke arah

pantai atau laut sehingga Kawasan Boulevard dan sekitarnya lebih terbuka menjadi salah satu bagian kota yang berorientasi ke laut. Adapun beberapa kawasan reklamasi pantai di kota Batam yaitu kawasan Teluk Tering Batam Centre, Ocarina, Golden Prawn dan Nongsa Batam.

Pada dasarnya unsur pembentuk lingkungan perkotaan di berbagai tempat, relatif sama tetapi susunannya berlainan, sehingga bentuk, struktur dan pola lingkungan yang dipahami dan dicerna manusia pada tiap lingkungan kota senantiasa berbeda-beda. Oleh karena itu dampak reklamasi pantai terhadap lingkungan perlu dilakukan guna dijadikan bahan pertimbangan terhadap tindakan reklamasi yang akan dilakukan kedepan sehingga segala kemungkinan – kemungkinan yang baik dan buruk sudah dapat dipikirkan dan menjadi acuan guna keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan alam yang terjaga.

Pulau Putri adalah salah satu contoh pulau yang di Indonesia khususnya Batam Kepulauan Riau yang merupakan pulau terluar dari negara ini, ada beberapa pulau yang termasuk kedalam pulau terluar ini selain daripada pulau putri tersebut yakni Pulau Nipah, Pulau Batu Berhenti, Pulau Pelampong, Pulau Kareng Banten dan juga Pulau Karang Helen yang kini dimiliki Batam.

Ketika surut menjelang terlihat jelas pulau ini menampakkan tiga bukit yang terpisah oleh bebatuan yang landai. Tapi saat air laut pasang akan terlihat sesuatu yang berbeda yaitu tiga pulau yang terpisah, gerusan ombak yang terkadang setiap saat menerpa pulau ini terkadang membuat rusak sebagian pulau sehingga menyebabkan kemunduran batas garis pantai dari pulau tersebut.

Bagian pulau ini pula yang paling terancam hilang akibat abrasi adalah bukit paling utara dan tengah. Bukit paling utara makin landai dan besarnya tak lebih dari rumah ukuran 5 x 5 meter persegi. Pohon niur yang dulu tumbuh subur kini hanya tinggal satu pohon. Itu pun hanya tinggal batang yang berdiri setinggi 10 meter. Pohon ini telah mati

karena tidak ada lagi unsur hara yang bisa diserap. Pokok niur ini belum tumbang karena ditopang batu-batu besar semula jadi yang kini menjadi penahan dari Pulau Putri agar terhindar dari gerusan ombak laut yang kian hari mengikis pulau ini.

Sementara bukit yang ada di bagian tengah luasnya juga tak lebih dari rumah berukuran 10 x 10 meter dengan tinggi bukit sekitar 10 meter. Masih ada beberapa tumbuhan yang bertahan karena terhalang bongkahan batu besar. Bukit yang tengah ini awalnya juga terhubung dengan bagian selatan, namun kini sudah landai, meninggalkan batuan-batuan kecil. Hanya ada satu rimbunan pohon bakau dan delapan pohon pedada (jenis bakau untuk bagian dalam) yang masih bertahan dari gerusan ombak. Khusus untuk bagian selatan atau tempat mercusuar, luasnya juga makin berkurang. Bahkan, saat musim utara (Desember), air laut sudah menutupi pulau ini setinggi lutut orang dewasa. Beberapa kali rumah penjaga mercusuar kebanjiran. Tapi mesin genset untuk lampu mercusuar sekarang baru, tempatnya sudah ditinggikan, karena sebelumnya rusak kena air laut.

Kondisi Pulau Putri atau di peta dikenal dengan nama Pulau Nongsa ini yang terancam hilang itu memang memperhatikan. Pasalnya, karena pulau ini berada di wilayah Batam yang bisa dijangkau hanya dengan menempuh waktu sekitar 10 menit menggunakan pompong bermesin tempel dari Pantai Kampung Tua Nongsa. Namun Pemerintah Kota Batam tidak terlalu memberi perhatian terhadap pulau ini. Itu semua terbukti tidak adanya upaya untuk mencegah abrasi yang kian hari kian membuat pulau ini terancam hilang.

Tidak hanya terancam hilang, terumbu karang di sekeliling pulau ini juga mulai melihat kehancuran dan mati secara perlahan. Selain disebabkan ombak dari kapal-kapal super tanker dan kapal cepat, karang di pulau ini juga rusak dan mati akibat seringnya pulau ini mendapat kiriman limbah minyak hitam yang dibuang oleh kapal-kapal yang lalu lalang di perairan

Internasional yang memang jaraknya dari bibir pulau kurang dari 1 kilo meter.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dampak

Dampak bisa diartikan juga sebagai perubahan atau efek yang dapat bersifat positif maupun negatif yang muncul dari sebuah akibat pelaksanaan aktivitas atau kegiatan. Menurut Irawan (2015:29), dampak adalah berubahnya kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari hasil suatu kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects). Menurut Dye dalam (Anggara, 2014:294) Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, harus diukur dalam bentuk simbolis atau efek nyatanya.

2.2 Pengertian Reklamasi

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Dalam kamus yang sama pula arti dari kata *reclamation* dapat diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan

manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama dari reklamasi ini adalah menjadikan suatu kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi suatu hal yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, nantinya akan dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah yang efektif bagi suatu kota. Reklamasi yang diamalkan oleh negara ini atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi ini pula, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru yang dikenal dengan nama reklamasi ini.

Cara reklamasi ini dapat memberikan keuntungan dan juga dapat membantu negara/kota dalam rangka menyediakan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan masih banyak keuntungan lainnya dari diadakannya kegiatan reklamasi ini.

Reklamasi kawasan perairan ini pun juga merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan suatu kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lainnya. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah

dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Salah satu upaya pemanfaatan dan penataan wilayah pesisir dengan diadakannya reklamasi pantai. Reklamasi pantai ini seringkali dijadikan solusi atau alternatif pemerintah untuk mengembangkan wilayah pesisir. Reklamasi pantai biasanya dilakukan oleh Negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya, lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi seperti ini maka banyak kota – kota yang melakukan reklamasi sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan lahan.

Reklamasi merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan ataupun penataan wilayah pesisir dengan mengadakan suatu hal yaitu reklamasi pantai. Reklamasi pantai ini seringkali dijadikan sebagai salah satu solusi atau alternatif pemerintah untuk mengembangkan wilayah pesisir. Reklamasi pantai yang biasanya dilakukan oleh Negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat akan tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan dan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi seperti ini maka banyak kota – kota yang melakukan reklamasi sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan lahan.

2.3 Tujuan Reklamasi

Biasanya kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru. Dalam konteks pengembangan wilayah, reklamasi kawasan pantai ini diharapkan akan

dapat meningkatkan daya tampung dan daya dukungan lingkungan (environmental carrying capacity) secara keseluruhan bagi kawasan tersebut. Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonominya dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Hal ini biasanya terjadi karena semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, sehingga perlu dicari solusinya.

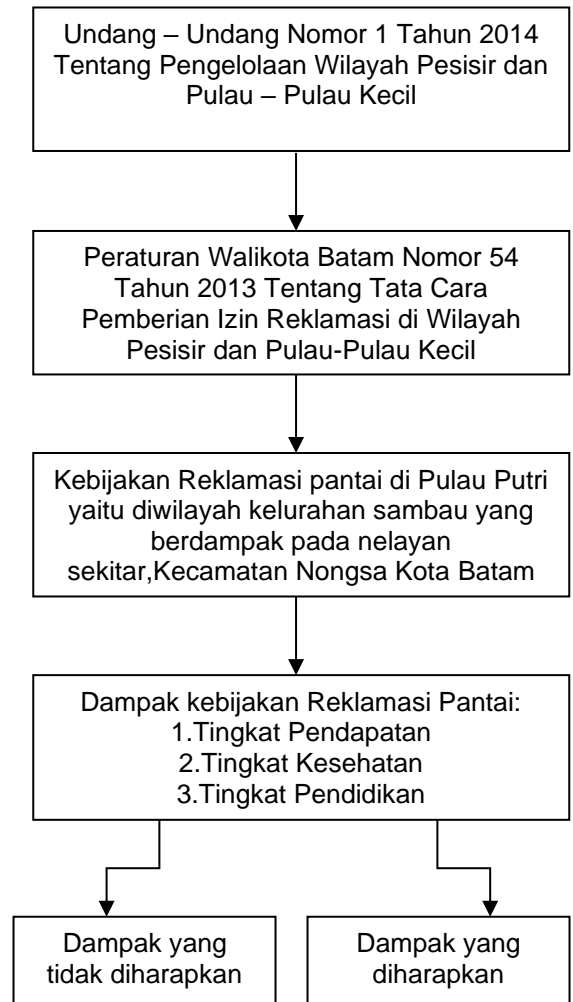
Tujuan reklamasi juga yaitu untuk memperbaiki daerah atau area yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri serta banyak manfaat lainnya guna keuntungan manusia bersama kehidupannya.

2.4 Dampak Reklamasi

Dalam melakukan reklamasi terhadap kawasan pantai, harus memperhatikan berbagai aspek atau dampak yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut antara lain adalah dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi. Dampak lingkungan misalnya mengenai perubahan arus laut, kehilangan ekosistem penting, memungkinkan terjadinya banjir yang semakin parah, perubahan hidrodinamika yang semuanya tertuang dalam analisis dampak lingkungan. Dampak sosial budaya diantaranya adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM (dalam pembebasan tanah), perubahan kebudayaan, konflik masyarakat, dan isolasi masyarakat. Sementara dampak ekonomi diantaranya berupa kerugian masyarakat, dan khususnya nelayan yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka akibat reklamasi.

2.5 Kerangka Teori

Menurut Burhan Bungin (2013:194) kerangka pemikiran adalah peneliti dapat merumuskan gejala atau permasalahan yang diteliti dan mampu mendefinisikan berita yang objektif.



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode ini mendefinisikan bagaimana peneliti menelaah atau memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu koneksi khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai sumber.

Menurut (sugiyono,2014:9) metode deskriptif adalah peneliti berperan sebagai instrument untuk meneliti pada situasi yang alamiah. Dalam metode deskriptif pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dapat

menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menekankan pada generalisasi dan data pada metode deskriptif bersifat induktif/kualitatif

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (Sugiyono,2014:209) adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian ini penentuan fokus ditentukan berdasarkan hasil survey dan tingkat perbaruan informasi yang akan di peroleh dari situasi sosial di lapangan. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa masalah ini,maka penelitian ini memfokuskan penelitian kepada dampak reklamasi di pulau putri nongsa Batam.

3.3 Sumber Data

Populasi tidak selalu dimanfaatkan dalam suatu penelitian kualitatif,akan tetapi menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2012 : 215) menamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: sebuah tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis. Ada dua sumber data yg dimanfaatkan peneliti, yaitu data primer dan data sekunder.

1.Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pihak yang menjadi narasumber penelitian. Narasumber dipilih dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan narasumber dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan informan yang menjadi narasumber merupakan informan yang jelas dalam memberikan informasi secara mendalam kepada peneliti.

Berdasarkan teknik pemilihan informan tersebut maka ditetapkan kriteria-kriteria informan penelitian ini:

a. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau diluar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.

b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

a.Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

b.Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah informasi terlebih dahulu serta relatif masih lugu ketika menyampaikan informasi

2.Data sekunder yang dimaksud oleh peneliti adalah data yang diberikan secara langsung kepada peneliti, misalnya lewat perantara. Selain itu data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, seta website resmi dari dinas dan beberapa buku, jurnal yang sesuai dengan dibutuhkan oleh peneliti.

3.4 Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012:246-253) dalam Miles dan Huberman mendefenisikan bahwa kegiatan yang dalam suatu analisis data kualitatif dapat dilaksanakan secara interaktif dan berjalan secara berkelanjutan sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Colection* (pengumpulan data)
Peneliti melakukan pengumpulan data, informasi penting dan akurat sesuai denga kebutuhan data yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti datang langsung ke Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Kota Batam guna mendapatkan data yang dibutuhkan.
2. *Data Reduction* (reduksi data)
Peneliti mereduksi dengan cara meringkas atau mencocokkan serta mengolah data-data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti memilah data untuk dipilih antara data yang mau di pakai atau tidak. Dengan seperti itu data yang sudah di hubungkan memeberikan gambaran kepada peneliti dan memudahkan pencarian data selanjutnya.
3. *Data Display* (penyajian data)
Dalam data display yaitu penyajian yang bisa diuraikan sangat singkat,bagan atau data sejenisnya

merupakan data teks yang dapat dijelaskan.

4. *Conclusion Drawing/verification*

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara berkala sepanjang penelitian dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dengan mencari pola, tema hubungan persamaan satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen analisis yang dikutip dari Miles dan Huberman disebut dengan analisis "model inaktif".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Adapun Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera IV pada tahun 2007 sampai dengan 2010 berlokasi di KK Water Front City New Town Shop House No. 102 Sei Temiang – Batam. Setelah selesai dibangun gedung kantor yang baru pada tahun 2010, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV mulai menempati gedung kantor baru yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata No.1 Sekupang – Batam.

Selain itu pemerintah juga berperan sebagai pendukung pencapaian visi dan misi guna meningkatkan dalam memberikan pelayanan rekomendasi Teknis yang terpadu dalam rangka menuju kemanfaatan sumber daya air yang harmonis dan berkelanjutan serta usaha dalam rangka perizinan perusahaan dan penggunaan sumber daya air, sungai, dan pantai yang ada di Kota Batam.

4.2 Tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Kota Batam

Balai Wilayah Sungai Sumatera IV mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan pantai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, pantai, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa,

tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase terutama yang di tempatkan di perkotaan.

4.3 Fungsi Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Kota Batam:

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai maupun pantai.
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan program teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
6. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
9. Pengelolaan sistem hidrologi;
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
11. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;

4.4 Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi di Pulau Putri Kota Batam

Setiap organisasi publik harus mampu dalam memilih sasaran pelaksanaan kebijakan yang harus dicapai. Pelaksanaan pada dasarnya merupakan suatu realisasi terhadap suatu kebijakan yang dibuat, seperti

yang dikemukakan Gordon dalam Pasolong (208:58), dalam (Mulyadi, 2016 : 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Yang menjalankan program-program atau kebijakan-kebijakan yang ada agar mencapai nilai efektif dan hasil yang diinginkan. Kebijakan-kebijakan yang berpedoman pada visi dan misi serta rencana strategis organisasi publik tersebut.

Dewasa ini, menyangkut dengan perekonomian yang berdampak langsung terhadap para nelayan dan masyarakat disekitarnya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan reklamasi ini di pulau Batam Khususnya pantai Pulau putri yang berada di kecamatan Nongsa Kota Batam. BWS Sumatera IV. Dengan ditunjuknya Kota Batam untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pelimpahan wewenang tersebut mengacu pada Ruang lingkup Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, reklamasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/ atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi

4.5 Evaluasi Kebijakan Reklamasi di Pulau Putri Kota Batam

Tahap terakhir yang dilakukan dalam sebuah kebijakan adalah dengan cara mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan agar dapat mengenal dan mengetahui apakah telah dicapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam artian yang lebih spesifik, evaluasi ini berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat dari hasil suatu kebijakan yang dibuat. Ketika hasil suatu kebijakan itu pada akhirnya mendapatkan nilai, karena itu hasil tersebut memberikan sumbangan pada kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Evaluasi

terkait Kebijakan yakni Reklamasi di Pulau Putri oleh BWS Sumatera IV Kota Batam, dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari Dunn dalam (Mulyadi, 2016) dimana terdapat enam macam kriteria yang dapat digunakan dalam menilai suatu kebijakan berhasil atau tidaknya, yakni: Keefektifan, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan, dan Ketepatangunaan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Reklamasi Pantai Nongsa Pulau Putri Batam

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di Pulau Putri Nongsa Batam ini, maka dapat disimpulkan pula bahwa kegiatan reklamasi menghasilkan beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi Pra dan Pasca Intervensi Kebijakan Reklamasi terjadi perubahan kondisi perekonomian nelayan
- b. Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Reklamasi manfaat sosial ekonomi belum diterima masyarakat dan kebijakan ini
- c. Tujuan atau sasaran Kebijakan Reklamasi Untuk membenahi atau menata kawasan sekitar pantai guna peningkatan nilai ekonomi.

2. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Pulau Putri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai di Pulau Putri Nongsa Batam, dapat disimpulkan bahwa kebijakan reklamasi pantai di Pulau Putri Nongsa Batam juga menghasilkan dampak yaitu:

- a. Perubahan kondisi laut yang semakin sempit dan rusaknya ekosistem laut menyebabkan beberapa nelayan menjadi kesulitan mencari ikan dan menyebabkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan menjadi menurun,
- b. Perubahan kondisi perekonomian nelayan yang menurun secara langsung juga mempengaruhi pendidikan anak nelayan, yang membuat para nelayan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.
- c. Kebijakan reklamasi di Pantai Pulau Putri Nongsa juga menyebabkan

dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya yang berada di sekitar kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012).
Kebijakan Publik (2 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Anggara, S. (2014).
Kebijakan Publik. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Akapermana D Ruchyat. 2013.(Pengamat Penataan Ruang dan Pengembangan).
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.
- Herry, 2015,
Reklamasi pantai dan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik di wilayah kepebisiran Kota Ternate, tesis Ilmu Lingkungan (Magister Pengelolaan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M Tahun 2007 - bkprn Islamy, M. I. (2014).
Kebijakan Publik (2 ed.).
Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mulyadi, D. (2016a).
Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. (H. T.Gedeona, Ed.) (2ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2016b).
Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suaib, M. R. (2016).
Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: CALPULIS.
- Sugiyono. (2012).
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2014).
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV.